

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2010. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Kementerian PPN/Bappenas selama 5 tahun. Sesuai dengan kewenangannya, Kementerian PPN/Bappenas dalam 5 tahun kedepan akan mewujudkan tujuan dengan menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas dan melaksanakan penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut akan dicapai melalui berbagai sasaran dan indikator yang terukur sesuai dengan target masing-masing pencapaian sasaran tujuan organisasi Kementerian PPN/Bappenas.

Pada tahun 2010, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) di bidang perencanaan, yaitu melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional tahun 2011. Rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional tersebut dihasilkan melalui suatu proses analisis kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta koordinasi perencanaan baik tingkat pusat/daerah maupun sektoral/lintas sektoral. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Disamping itu, Kementerian PPN/Bappenas juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan tugas-tugas tersebut, Kementerian PPN/Bappenas akan menjelaskan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2010.

Pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

PENGUKURAN KINERJA				
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL				
TAHUN ANGGARAN : 2010				
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas proses perencanaan dan dokumen rencana pembangunan yang dihasilkan baik secara substantif maupun penganggaran nasional	Persentase rancangan rencana dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional bidang: - sumber daya manusia dan kebudayaan - politik, hukum, pertahanan, dan keamanan - kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah - ekonomi - sumber daya alam dan lingkungan hidup - sarana dan prasarana - pengembangan regional dan otonomi daerah - pendanaan pembangunan - evaluasi kinerja pembangunan - pengawasan dan kinerja aparatur negara yang menjadi kebijakan antara lain dalam RKP 2011 atau DRPHLN-JM 2010-2014	100%	100%	100
Terlaksananya tugas-tugas lainnya termasuk yang diberikan oleh Pemerintah/Presiden	Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas dalam penanganan permasalahan strategis nasional	20% dibandingkan tahun sebelumnya	20% dibandingkan tahun sebelumnya	100
Meningkatnya kualitas pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan penyelenggaraan Diklat Perencanaan	Persentase alumni yang memperoleh penempatan kembali sesuai dengan latar belakang studi S2/S3	80%	75%	93,75
	Persentase alumni yang diikutsertakan dalam proses penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah	80%	75%	93,75

PENGUKURAN KINERJA				
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL				
TAHUN ANGGARAN : 2010				
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase alumni diklat non gelar substantif yang dinilai mampu melakukan aplikasi pengetahuan hasil diklat ke dalam proses penyusunan rencana	80%	75%	93,75
	Persentase alumni diklat non gelar penjenjangan fungsional perencana yang telah diangkat ke dalam atau naik ke jenjang jabatan perencana yang lebih tinggi	80%	75%	93,75
	Persentase perencana (JFP) memahami dokumen peraturan dan mendorong efektifitas pelaksanaan tugas serta pengumpulan angka kreditnya	80%	75%	93,75
Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi pegawai Kementerian PPN/ Bappenas	Persentase pegawai merasakan relevansi yang positif antara diklat pegawai dengan peningkatan kompetensi pegawai Kementerian PPN/Bappenas	80 %	80 %	100
	Persentase penilaian pejabat eselon I dan II Kementerian Negara PPN/Bappenas yang menyatakan terjadi peningkatan kompetensi pegawai yang telah mengikuti diklat	80 %	80 %	100
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas dan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai	Persentase sarana dan prasarana serta fasilitas kerja pendukung lainnya yang terlaksana dengan baik	40%	40%	100
Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase peningkatan kualitas pelayanan umum di Kementerian PPN/Bappenas	30 %	30%	100
Meningkatnya efektivitas SPIP di Kementerian PPN/Bappenas	Meningkatnya efektivitas SPIP di Kementerian PPN/Bappenas	Skor 5	Skor 5	100
	Tingkat kepuasan internal di bidang pengawasan	60%	68%	113
	% temuan yang ditindaklanjuti	20%	33%	165
	Jumlah LHP yang disampaikan ke Menteri PPN/Kepala Bappenas	9	10	111

Pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2010 merupakan keberhasilan Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dalam menghasilkan rencana pembangunan nasional (Rencana Kerja Pemerintah/RKP 2011) yang berkualitas serta dapat melaksanakan penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua pencapaian tersebut telah sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan merupakan kontrak kinerja yang sudah disepakati.

Seluruh pencapaian dalam menghasilkan rencana kebijakan pembangunan nasional (RKP 2011) dilaksanakan melalui tahapan-tahapan perencanaan yang dimulai dari penyusunan rencana pembangunan nasional, penetapan rencana pembangunan nasional, pemantauan atas rencana yang telah ditetapkan serta melaksanakan evaluasi kinerja atas rencana yang telah dilaksanakan. Proses tersebut diharapkan dapat menjamin koordinasi, konsistensi dan integrasi rencana pembangunan yang disusun sehingga seluruh *stakeholders* pembangunan, baik di tingkat pusat dan daerah, dapat mewujudkan pembangunan nasional sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.